

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan sebuah kota, merupakan topik yang selalu menarik untuk dikaji, karena memiliki berbagai permasalahan kompleks yang menjadi ciri khas dan membedakan antara satu kota dengan kota yang lain. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang memiliki sejarah panjang dan berperan penting di Indonesia. Kota Bandung dengan berbagai corak masyarakat di dalamnya menjadikan kota ini memiliki ciri khas tersendiri. Kota Bandung adalah Ibukota Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Kotamadya Bandung, pernah menjadi Ibukota Keresidenan Priangan dan Kabupaten Bandung, bahkan sempat akan menjadi ibukota pemerintahan Hindia Belanda semasa Indonesia menjadi jajahan Belanda (Katam, 2006 : 2). Secara umum, Kota Bandung dibagi menjadi lima bagian yakni Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur. Sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara kelima wilayah ini, karena pada umumnya kota tumbuh mengikuti irama masyarakatnya. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, masing-masing wilayah kemudian berkembang dan memiliki kekhasan maupun keistimewaannya tersendiri (Panitia Hari Buku Nasional IKAPI Jawa Barat, 2008 : 17).

Pemerintah Kota Bandung membuat suatu perencanaan kota yang tertuang dalam Rencana Induk Kotamadya (RIK) Bandung. Rencana Induk ini kemudian dijadikan dasar dalam pengembangan dan pembangunan di Kota Bandung.. Dalam Rencana Induk Kotamadya Bandung tersebut dijelaskan bahwa Kota Bandung memiliki program pembangunan yang menjadikan Bandung sebagai kota dengan 5 fungsi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, telah ditetapkan fungsi Kota Bandung sebagai berikut : 1. Pusat administrasi Pemerintahan Daerah Jawa Barat dan lokal, 2. Pusat Perdagangan lokal dan regional, 3. Pusat perindustrian,

Resti Gistiani, 2014

Perubahan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Tegallega Kota Bandung: kajian historis tahun 1987 - 2005

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Pusat pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 5. Pusat Pariwisata dan Kebudayaan (Dinas Tata Kota Kotamadya Bandung, 1985 : III-11). Salah satu fungsi dari Kota Bandung adalah sebagai pusat perindustrian, Kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu, kemudian merangsang tumbuhnya berbagai industri dan pabrik di Kota Bandung. Dengan kemunculan industri di Kota Bandung kemudian menyebabkan terbukanya perkembangan di berbagai bidang dan membawa perubahan bagi masyarakat Kota Bandung itu sendiri.

Berdasarkan PP No 16 tahun 1987, wilayah administratif Kota Bandung diperluas dari 8.098 Ha menjadi 17.000 Ha. Dari perluasan wilayah inilah kemudian Kota Bandung dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Pembagian wilayah pengembangan ini disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing wilayah. Dalam kurun waktu 1987-2005 banyak terjadi perubahan di Kota Bandung, dipicu oleh pertumbuhan sentra-sentra industri dan bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung.

Salah satu wilayah yang berkembang dengan cukup pesat adalah wilayah Bandung bagian selatan yaitu Wilayah Tegallega. Wilayah Tegallega pada awalnya merupakan kawasan pertanian dan kawasan pemukiman penduduk, namun sejak munculnya industri-industri besar maupun kecil di wilayah ini kemudian membawa perubahan baik bagi lingkungan fisik maupun keadaan masyarakatnya.

Kelahiran dunia industri membutuhkan banyak tenaga kerja, baik tenaga terampil tingkat atas, menengah maupun tenaga kasar. Kebutuhan akan tenaga kerja ini kemudian diikuti dengan proses urbanisasi yang tinggi (Hariyono, 2007 : 63). Pertumbuhan industri yang menjanjikan kesempatan kerja yang lebih besar dan beragam mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi dari daerah sekitar Kota Bandung, bahkan dari luar Provinsi Jawa Barat ke dalam Wilayah Tegallega. Migrasi penduduk dari luar daerah tersebut membuat kenaikan jumlah penduduk yang sangat pesat dan semakin menambah kepadatan penduduk di wilayah ini. Dengan pertumbuhan industri yang diikuti dengan masuknya pendatang menyebabkan daerah ini semakin terbuka. Pembangunan di berbagai bidang semakin pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Proyek-proyek seperti pembangunan perumahan, sentra perdagangan, transportasi maupun prasarana dan fasilitas masyarakat semakin marak. Sejak 1980-an, dimulai proyek pembangunan dalam skala besar yang sebagian besar dikelola oleh para pemodal swasta. Para pemodal ini mendirikan pusat-pusat pertokoan maupun perumahan yang sebagian ditujukan kepada masyarakat golongan menengah keatas. Untuk kepentingan lalu lintas, dibangun pula jaringan jalan baru seperti Jl. Lingkar Selatan, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Jenderal Soedirman, di sepanjang jalan inilah kemudian muncul berbagai industri, usaha angkutan, ruang pajang (*showroom*) mobil dan perusahaan-perusahaan lain. Pada awal 1990 dimulai pembuatan jalan tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) yang melingkari wilayah Bandung bagian selatan (Voskuil, 1996 : 192-194).

Pembangunan di Wilayah Tegallega tersebut tidak hanya membawa pengaruh positif, akan tetapi penduduk yang semakin padat kemudian membawa problematikanya tersendiri. Misalnya masalah perkembangan kota yang ditandai dengan perluasan wilayah dan masalah permukiman. Pada saat yang sama muncul pula masalah kesejahteraan masyarakat seperti banyaknya pengangguran, munculnya sektor informal dan menjamurnya permukiman kumuh. Hal ini akibat dari laju urbanisasi yang tinggi, namun daerah tersebut belum sepenuhnya siap menampung kedatangan para urbanisasi secara tertata (Hariyono, 2007 : 83).

Pembangunan yang memerlukan lahan, mengakibatkan kawasan terbangun bertambah dan kebutuhan akan lahan meningkat. Kebutuhan akan lahan tersebut mengakibatkan adanya pergeseran penggunaan lahan atau konversi. Areal-areal yang awalnya merupakan lahan pertanian kemudian berubah menjadi wilayah permukiman atau industri. Lahan pertanian semakin berkurang dari tahun ke tahun dan beralih fungsi penggunaannya. Hal ini juga tentu menimbulkan dampak bagi masyarakat yang memiliki tanah di daerah ini, tanah tersebut dibeli dan dijadikan lahan komersil oleh para pemodal.

Selain masalah penggunaan lahan, permasalahan permukiman kumuh juga merupakan masalah yang muncul akibat penduduk yang semakin padat. Masyarakat yang bertambah tentu memerlukan permukiman baru, sedangkan pembangunan perumahan yang digerakkan oleh swasta lebih kearah komersil dan

ditujukan bagi masyarakat menengah ke atas. Dalam hal penyediaan permukiman penduduk, sejak tahun 1980-an pemerintah mengadakan program pengadaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat seperti Perumnas dan KPR-BTN. Namun pengadaan perumahan ini belum menjangkau semua kalangan masyarakat sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak mampu membelinya. Akibatnya banyak masyarakat tinggal di rumah-rumah petak dan sempit bahkan menggunakan lahan-lahan ilegal, dan muncullah pemukiman-pemukiman kumuh.

Banyaknya pendatang yang tidak memiliki pendidikan maupun keahlian yang cukup menambah golongan masyarakat miskin. Jumlah masyarakat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran dan susah mencari pekerjaan. Penduduk yang datang dari desa, tanpa pendidikan dan keahlian, tak punya keterampilan sebagai modal kerja, apalagi punya uang untuk berdagang, akhirnya mereka semua tersuruk-suruk menggeluti sektor informal di kota. Bidang kerja yang mereka pilih berkisar pada apa yang disebut “*dead-end jobs*” seperti tukang beca, buruh, pedagang asongan, pembantu, tukang sayur, pemulung, tukang semir sepatu, atau “*front-porch business*” seperti warung kecil, tukang rokok, tukang jahit dan tukang cukur. Karena penghasilannya minim, maka masyarakat seperti ini tidak mampu menjangkau program perumahan rakyat seperti Perumnas atau BTN sehingga mereka terpaksa menempati lahan-lahan ilegal. Hal ini mengakibatkan daerah perkampungan kumuh (*slums area*) tumbuh dengan pesat (Kunto, 1992 : 210). Dalam mengatasi permukiman kumuh ini pemerintah juga mencanangkan program perbaikan kampung namun program ini hanya mencakup sebagian kecil Wilayah Tegallega, sedangkan sisanya masih belum mengalami perbaikan.

Perkembangan yang terjadi di Wilayah Tegallega menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi pembangunan diperlukan demi kemajuan kehidupan masyarakat, tapi di sisi lain mengakibatkan permasalahan baru. Keadaan Wilayah Tegallega yang berubah menyebabkan masyarakat daerah tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, karenanya perubahan diperlukan dalam masyarakat sebagai upaya untuk bertahan terhadap keadaan yang baru. Masyarakat yang tidak

memiliki daya saing dan kemampuan, akan sulit untuk bertahan dalam keadaan daerahnya yang dinamis. Karenanya, muncul golongan masyarakat yang termarginalkan, mereka yang tidak mampu beradaptasi kemudian menjadi terpinggirkan. Masyarakat yang terpinggirkan tersebut sebagian menjalani pekerjaan di bidang sektor informal. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nampaknya belum mampu menangani urbanisasi dan permasalahan yang timbul karenanya. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega, Kota Bandung.

Penelitian mengenai Kota Bandung secara umum sudah banyak dilakukan, akan tetapi kajian yang menyoroti Wilayah Tegallega masih sangat terbatas. Kebanyakan tulisan-tulisan tentang daerah ini mengkaji sejarah dan pemerintahan, adapun mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat masih sulit ditemui. Wilayah Tegallega sendiri merupakan salah satu wilayah pembangunan di Kota Bandung yang sangat terlihat perkembangannya dalam berbagai bidang. Dalam beberapa tahun, wilayah ini berubah yang pada awalnya daerah pertanian dan pemukiman, sejak dekade 1970-an berkembang menjadi kawasan industri dan komersial yang berperan penting bagi Kota Bandung. Akan tetapi, perkembangan ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar akibat terjadinya urbanisasi berlebih. Permasalahan seperti pergeseran lahan, pengangguran, dan pemukiman kumuh muncul seiring dengan perkembangan yang terjadi. Pemerintah sendiri sudah banyak berupaya untuk menangani masalah-masalah tersebut, akan tetapi masih belum mampu menangani hal tersebut dengan baik (Voskuil, 1996 : 192). Karenanya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai Perubahan Sosial Ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega 1987-2005.

Batasan waktu yang diambil dalam skripsi ini adalah tahun 1987 hingga tahun 2005. Tahun 1987 diambil sebagai batas awal kajian skripsi ini, dikarenakan pada tahun tersebut Kota Bandung mengalami perluasan wilayah yang tadinya 8.098 Ha menjadi 17.000 Ha. Perluasan ini mencakup wilayah Bandung bagian

Selatan, khususnya Wilayah Tegallega. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat daerah tersebut karena adanya perluasan wilayah. Adapun tahun 2005 diambil sebagai batas akhir kajian ini, karena penulis menganggap untuk mengkaji kehidupan sosial ekonomi dirasa cukup mengalami perubahan selama 18 tahun. Di tahun 2005 pula merupakan akhir Rencana Induk Kota Bandung yang dimulai sejak 1985 untuk kemudian disusun kembali. Hal ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pembangunan Kota Bandung setelah 2005 karena perencanaannya yang juga berubah. Jadi tahun 1987-2005 merupakan tahun yang sesuai dengan kajian yang dibahas karena corak pembangunan yang masih mempergunakan Rencana Induk yang sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai perubahan sosial ekonomi Kota Bandung untuk kemudian direalisasikan dalam skripsi yang berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi di Wilayah Tegallega, Kota Bandung : Kajian Historis Tahun 1987-2005”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang akan dikaji adalah *Bagaimana perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Tegallega 1987-2005*. Agar pembahasan lebih terfokus, maka penulis mengembangkannya dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega Kota Bandung sebelum tahun 1987 ?
2. Bagaimanakah proses pembangunan di Wilayah Tegallega sejak 1987-2005 ?
3. Bagaimanakah dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega selama 18 tahun (1987-2005) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulis. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan

pelajaran berharga dari peristiwa sejarah di masa lampau agar menjadi pijakan dalam melangkah ke depan, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memaparkan perubahan sosial ekonomi masyarakat Wilayah Tegallega dari tahun 1987-2005. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega sebelum terjadinya perluasan wilayah. Gambaran umum Wilayah Tegallega ini meliputi : kondisi geografis, keadaan administratif serta keadaan sosial ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega Kota Bandung sebelum terjadinya perluasan wilayah pada tahun 1987.
2. Menjelaskan mengenai pembangunan dan perkembangan yang terjadi di Wilayah Tegallega secara fisik. Hal ini meliputi perkembangan industri, perkembangan sentra-sentra bisnis, pembangunan sarana transportasi dan perkembangan permukiman di Wilayah Tegallega.
3. Mendeskripsikan mengenai dampak pembangunan yang dilakukan di Wilayah Tegallega dan menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat didalamnya. Hal ini meliputi permasalahan urbanisasi, perubahan fungsi lahan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Tegallega.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian mengenai Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Wilayah Tegallega pada tahun 1987-2005 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi penulis, dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai aplikasi teori yang didapat selama perkuliahan untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan praktis. Selain itu menjadi sebuah motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Wilayah Tegallega, dan Kota Bandung umumnya.

2. Bagi Sekolah-sekolah, dapat dijadikan bahan ajar kajian Sejarah Lokal dalam pembelajaran Sejarah. Dapat dijadikan sumber rujukan bagi penulisan karya ilmiah lainnya.
3. Bagi Pemerintahan Kota Bandung, dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan Kota Bandung dan memperkaya penulisan Sejarah Kota Bandung.
4. Bagi Masyarakat, dapat dijadikan suatu referensi dan bahan bacaan. Memberikan pengetahuan mengenai Kota Bandung, khususnya mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bandung dari tahun 1987 hingga tahun 2005. Selain itu, dapat memberikan gambaran bagi generasi muda mengenai kotanya.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode ini merupakan sebuah cara bagaimana mengetahui sejarah dengan tahapan-tahapan tertentu (Sjamsuddin, 2007 : 14). Adapun tahapan-tahapan tersebut diwujudkan dalam suatu prosedur penelitian Sejarah yang dikemukakan Louis Gottschalk (1975 : 32), yang terdiri dari empat langkah kegiatan yang saling berurutan sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Keempat langkah tersebut yaitu Heuristik (pencarian atau penemuan sumber), Kritik sumber, Interpretasi (penafsiran) dan Historiografi (penyajian dalam bentuk cerita sejarah).

1.5.1 Heuristik (pencarian atau penemuan sumber)

Sebagai langkah pertama dalam penelitian sejarah ini adalah Heuristik. Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau menghimpun data dan sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti dokumen, naskah atau arsip, surat kabar, maupun buku-buku referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pada tahap Heuristik ini penulis mencari literatur-literatur kepustakaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai perubahan sosial-ekonomi masyarakat di Wilayah Tegallega 1987-2005. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari sumber yang relevan

dengan permasalahan yang diangkat, dengan mengunjungi berbagai perpustakaan dan toko buku. Selain itu juga peneliti mencari sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan yaitu dengan mengunjungi Lembaga-lembaga pemerintahan dan Lembaga-lembaga pemerhati Kota Bandung, seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Badan Pusat Statistik, Arsip dan Perpustakaan Daerah serta Kantor-kantor Kecamatan yang berada di Wilayah Tegallega. Langkah ketiga adalah mencari beberapa narasumber untuk diwawancarai mengenai keadaan Wilayah Tegallega pada tahun 1987 hingga 2005.

1.5.2 Kritik Sumber

Kritik sumber adalah tahap penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dilihat dari sudut pandang nilai kebenarannya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah ini dapat diteliti secara otensitas maupun kredibilitasnya, sehingga benar-benar dapat teruji keasliannya. Dalam kritik sumber peneliti melakukan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

1.5.2.1. Kritik ekstern

Kritik ekstern dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan keotentikan suatu sumber sejarah. Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan kritik ekstern terhadap sumber yang berupa dokumen, arsip dan laporan lembaga. Hal ini berusaha menjawab pertanyaan keaslian sumber sejarah misalnya : kapan dan dimana serta dari bahan apa sumber tersebut ditulis, sumber utamanya merupakan sumber-sumber sejarah yang sejaman.

1.5.2.2. Kritik intern

Penulis melakukan kritik intern dengan tujuan untuk mencari nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah. Kritik intern dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak (Notosusanto, 1972 : 21). Kritik intern ini dilakukan setelah peneliti selesai membuat kritik ekstern, setelah diketahui otensitas sumber, maka dilakukan kritik intern untuk melakukan pembuktian apakah sumber-sumber tersebut benar-benar merupakan fakta historis.

Kritik intern ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana nilai pembuktian yang sebenarnya dari sumber itu berhubungan dengan hasil yang diperoleh. Untuk itu diperlukan dua cara yaitu : *pertama*, penilaian intrinsik sumber yaitu proses yang dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-sumber itu, apakah sumber tersebut cocok dengan kajian penelitian atau tidak agar peneliti tidak terjebak dalam pemakaian sumber yang asal-asalan. *Kedua*, membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber yaitu dimana proses ini dilakukan dengan cara menjelaskan kesaksian dari sumber yang ada sehingga mirip, mana yang sesuai dengan kajian penulis dan mana yang tidak perlu diambil sehingga akan mendapatkan sumber-sumber yang saling berkaitan dan berbobot. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, yang merupakan hasil studi kepustakaan. Tujuan dari kritik intern ini adalah untuk menetapkan kebenaran dan dapat dipercaya isi dari sumber tersebut.

1.5.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta yang bersesuaian satu dengan yang lain dan menetapkan artinya. Atau usaha untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. Proses menyusun, merangkaikan antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun.

1.5.4 Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang penulis lakukan. Tahap ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis. Penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lain menjadi satu rangkaian cerita yang masuk akal dan mendekati kebenaran. Dalam upaya mengumpulkan data dan

informasi mengenai penulisan skripsi ini, dilakukan beberapa teknik penelitian sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Di dalam studi kepustakaan akan diperoleh data yang bersifat primer dan sekunder. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber dari buku-buku, arsip tertulis, majalah, koran, jurnal dan internet. Tentunya sumber-sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Penulis juga mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan bukti-bukti sejarah, baik primer maupun sekunder yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, gambar, suara, tulisan dan sebagainya. Bentuk rekaman biasanya dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi dokumentasi ini dilakukan pada lembaga-lembaga yang diperkirakan memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang berupa hasil foto, film, sensus atau statistik, laporan penelitian, brosur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Wawancara

Peneliti juga mencari sumber lisan yaitu melakukan wawancara dengan penduduk yang hidup dan tinggal di kawasan Bandung bagian Selatan pada tahun 1987-2005. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang dijawab secara lisan oleh narasumber. Dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur, yang didalamnya terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan kemudian disusun ke dalam sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan dari penulisan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang didalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting untuk dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, Kajian kepustakaan. Bab ini berisi tentang berbagai pendapat bersumber pada literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Tegallega tahun 1987-2005.

Bab III, Metodologi Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber dan cara pengolahan sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Bab IV, Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Tegallega tahun 1987-2005. Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama. Dalam hal ini uraian dibagi ke dalam beberapa bagian, yang pertama yaitu gambaran umum Bandung bagian selatan atau Wilayah Tegallega, kemudian mengenai pembangunan yang terjadi di Wilayah Tegallega tahun 1987-2005, ketiga mengenai kondisi masyarakat setelah terjadinya perluasan wilayah dan pembangunan di Wilayah Tegallega 1987, dan keempat mengenai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Wilayah Tegallega sebagai dampak dari proses pembangunan yang terjadi.

Bab V, Kesimpulan. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan deskripsi dan beberapa saran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dibahas.